

**Makalah**

**Program Kompetensi Ganda Untuk  
Mengatasi Kekurangan Guru Produktif di SMK**

**Oleh;**

**Satriyo Agung Dewanto, MP.d**

**DR. Dra. Marwanti. MP.d**

Tahun 2017

## A. Pendahuluan

Tujuan Negara Republik Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat antara lain menyebutkan bahwa, kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, *mencerdaskan kehidupan bangsa*, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Negara Indonesia.

Sedang tujuan pendidikan yang ada dalam Pembukaan UUD Negara RI diuraikan lagi dalam UU SISDIKNAS yang menyatakan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk mencapai tujuan pendidikan itu diperlukan guru yang berkualitas tinggi yaitu guru yang berkompeten dibidangnya, religius, berkarakter, beretos kerja tinggi dan dapat menjadi contoh teladan bagi masyarakat serta peserta didiknya. Guru yang demikian itu di negara Indonesia masih sulit dijumpai apalagi problem di bidang pendidikan sekarang ini sangat banyak antara lain adalah kekurangan guru, yang disebabkan karena pensiun dan bertambahnya jumlah sekolah terutama Sekolah Menengah Kejuruan. Jika pemerintah mau mengangkat guru sebenarnya banyak calon guru yang tidak tertampung atau masih menganggur namun pemerintah tidak ada uang untuk membayarnya.

Visi Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014-2019 adalah “Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan berlandaskan Gotong Royong”, visi itu tidak akan sukses jika tidak diikuti aksi, maka diimplementasikan dalam misi Kemendikbud 2014 – 2019 melalui 5 M yaitu: *Pertama*, (M 1) adalah

mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat. *Kedua*, (M 2) mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan. *Ketiga*, (M 3) mewujudkan pembelajaran yang bermutu. *Keempat* (M 4) mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa. *Kelima* (M 5) mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektifitas birokrasi dan pelibatan publik.

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK maka Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kemendikbud berupaya meningkatkan kompetensi guru SMK serta kuantitasnya. Kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan penataan dan pemenuhan guru produktif SMK untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan vokasi. Jalan yang ditempuh antara lain memaksimalkan tugas guru yang ada Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan mengambil langkah strategis, merancang, dan mengimplementasikan Program Keahlian Ganda (PKG). PKG dinilai solutif mengatasi kekurangan jumlah guru produktif. Sedang di beberapa SMK kelebihan guru adaptif dan normatif.

## **B. Pembahasan**

Salah satu cara strategis yang perlu dilakukan Pemerintah dalam jangka pendek adalah program sertifikasi keahlian dan setifikasi pendidik bagi guru SMK/SMA yang selanjutnya disebut Program Keahlian Ganda, dengan program ini diharapkan dapat mengatasi kekurangan guru produktif di SMK dapat terpenuhi atau meminimalisir kekurangan guru produktif di SMK. Sedang rancangan program jangka panjang tahun 2017-2019 adalah 1).Melanjutkan Program Keahlian Ganda dan 2).Rekrutmen Guru Baru PNS untuk SMK Negeri maupun Swasta.

Untuk melaksanakan Program Keahlian Ganda, Kemendikbud melalui Ditjen GTK menyiapkan program Keahlian Ganda. Dalam melaksanakan Progran Keahlian Ganda ini Ditjen GTK melibatkan Unit Pelaksana Teknis (UPT), dibawahnya yaitu Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) lingkup kejuruan dan Lembaga

Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan, Teknologi Informasi, dan Komunikasi (LPPPTK-KPTK). Selain itu, Ditjen GTK juga melibatkan :1). Dinas Pendidikan Propinsi dalam hal penyediaan data guru yang akan mengikuti program keahlian ganda, termasuk memverifikasi data. 2). Dunia Usaha/Industri(DU/DI)dalam penyediaan tempat bagi guru untuk mengenal industri. 3). Lembaga pelatihan sebagai tempat melatih kompetensi keahlian kejuruan bagi guru peserta Program Keahlian Ganda. 4). Perguruan Tinggi.

Usaha pemerintah ini diperuntukkan bagi guru-guru normatif, adaptif dan produktif dengan tingkat jumlah yang lebih banyak melalui program Sertifikasi Keahlian dan Sertifikasi Pendidik bagi guru-guru SMA/SMK atau lebih dikenal “Program Keahlian Ganda”, yaitu program tersebut adalah pemberian tambahan kewenangan mengajar bagi guru SMK/SMA yang mengajar mata pelajaran tertentu menjadi guru mata pelajaran produktif di SMK pada kompetensi keahlian tertentu yang berbeda dengan kompetensi keahlian sebelumnya.

Diharapkan program ini juga dapat mengatasi kekurangan guru produktif di SMK. Guru adaptif, normative, dan produktif di SMA/SMK yang kelebihan guru diberi tambahan pengetahuan dan keterampilan kompetensi (diklat) tertentu. Diklat tersebut dilaksanakan di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik & Tenaga Kependidikan (PPPPTK) dan Lembaga dan Pemberdayaan Pendidikan & Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPPPTK KPTK) terkait sesuai bidang tugasnya.

SMK sebagai sekolah yang lebih berorientasi pada keterampilan (skill) perlu membekali peserta didiknya dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dunia usaha dan industri. Ditetapkannya Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia makin menegaskan bahwa SMK harus semakin lebih mendekati diri dengan kebutuhan dunia kerja. Hasil analisis Ditjen GTK Kemendikbud diperoleh data bahwa beberapa program keahlian di SMK mengalami kekurangan guru produktif, sedang guru program keahlian dan peminatan mata pelajaran lainnya jumlah guru melebihi

jumlah yang dibutuhkan. Kekurangan guru itu tersebar pada semua kompetensi keahlian.

Untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan khususnya pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, Presiden mengeluarkan Inpres RI No. 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Program revitalisasi pendidikan vokasi adalah amanah Nawacita (program pemerintahan Jokowi) selama memerintah dan *sustainable development goals 2030* (tujuan pengembangan yang berkelanjutan) dalam rangka pemenuhan 58 juta tenaga kerja terampil sampai tahun 2030 .

Guru sasaran yang akan mengikuti Program Keahlian Ganda ini berjumlah 30.000 guru, dalam pelaksanaannya dibagi dua tahapan, untuk tahap 1, berjumlah 2016 sejumlah 15.000 orang dan tahap kedua tahun 2017 sisanya 15.000 orang. Kewenangan mengajar pada paket keahlian yang baru bagi guru SMK/SMA diberikan setelah guru mengikuti tahapan proses pendidikan dan pelatihan (diklat) melalui pola "On -1 In-1 On-2 dan In -2" (teori dan praktek ) selama satu tahun.. Program keahlian ganda ini, sudah dimulai di awal bulan Januari 2017 dan semua peserta program keahlian ganda diberikan pembekalan mengenai seluk beluk program ini selama 5 hari, serentak seluruh Indonesia. Program tahap 1 akan berakhir Desember 2017 nanti.

Program keahlian ganda ini akan diakhiri dengan sertifikasi di lembaga sertifikasi profesi (LSP) untuk memperoleh sertifikasi keahlian dan sertifikasi pendidik dan latihan profesi guru (PLPG) di LPTK untuk memperoleh sertifikasi pendidik. Dalam pelaksanaan di lapangan, guru tersebut didampingi oleh guru pendamping , sebagai pembimbing yang sudah ditunjuk oleh Dirjen GTK dengan kriteria tertentu.

Namun seberapa efektif PKG dapat menghasilkan guru produktif berkualitas masih perlu diuji dan diteliti, karena guru yang dicetak hanya beberapa bulan dan bahkan setahunpun tentu akan lain hasilnya dengan guru yang dipersiapkan sekitar 4 atau 5 tahun untuk mengajar bidang studi tertentu. Data Ditjen GTK menyebutkan akhir Tahun 2016 Indonesia kekurangan guru

produktif 91.860. Terdiri dari 41.861 di SMK Negeri dan 50.000 di SMK Swasta. Kekurangan guru itu untuk bidang prioritas pendidikan pendidikan vokasi seperti: maritime, atau kelautan, pertanian dan ketahanan pangan, pariwisata, industri kreatif, serta teknologi dan rekayasa.

Terdapat 2 cara untuk mengatasi kekurangan guru: rekrutmen guru baru dan melaksanakan PKG. Pengangkatan guru baru tidak semudah membalik telapak tangan karena selain moratorium pengangkatan guru masih berlaku. Dan keuangan negara terbatas. LPTK ( Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan ), belum tentu mampu menyediakan tenaga guru yang dibutuhkan sesuai keahliannya. LPTK dalam hal ini tertinggal satu langkah dalam penyediaan guru. Ketika LPTK telah siap menyediakan guru yang dibutuhkan, guru tertentu tadi mungkin sudah tidak dibutuhkan lagi.

Kemendikbud menempuh cara PKG yang dinilai lebih tepat untuk era sekarang ini, untuk memenuhi kekurangan guru. Dalam PKG, seorang guru SMA/SMK bisa memiliki dua sertifikat: sertipikat pendidik dan sertifikat keahlian. Menurut rencana tahun 2017 dimulai PKG kepada 15.000 guru adaptif, yaitu guru yang saat ini mengajar mata pelajaran Fisika atau Matematika, Kimia, Biologi, IPS, TIK, dan bahasa Inggris. Responsnya sangat baik. Terdapat 16.000 guru mendaftar PKG. Ditjen GTK harus menyeleksi dari 16.000 diambil 15.000 saja untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat). Kekurangan guru dapat dipastikan terjadi menurunnya kualitas pendidikan. Artinya peningkatan mutu guru dan sekaligus peningkatan mutu pendidikan dapat terhambat karena kekurangan jumlah guru. Fakta menunjukkan pemenuhan guru secara instan, *crash program* dan insidental tidak akan linier dengan upaya perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan. Perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan tidak terjadi dengan sistem *crash program*. Pengalaman program sertifikasi guru membuktikan hal ini.

PKG dapat dipastikan bahwa belum mampu menghantarkan guru adaptif ke guru produktif dengan hanya melalui Diklat. Apa lagi dengan waktu 12 bulan melalui 4 tahap *ON (on service training)* dan *IN (In service training)*. Pada tahap ON ini peserta belajar mandiri di sekolah yang ditunjuk. Pada tahap ini juga

diberikan modul dan pendampingan. Sedang pada tahap IN ada di industri dan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) yang ditunjuk. Pada akhir Diklat, jika guru lulus ujian, guru yang menjadi peserta PKG dapat mendapatkan sertifikat ganda yaitu sertifikat keahlian dan sertifikat pendidik. Sertifikat keahlian dikeluarkan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi). Sedangkan sertifikat pendidik diterima setelah lulus Program sertifikasi Guru melalui Pola Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Dengan Diklat sistem ON dan IN ini yang diadopsi dari *sandwich system*, yang terbukti dapat meningkatkan kompetensi guru.

### **Menyesuaikan**

Perubahan kebutuhan guru produktif di SMK dari guru adaptif harus menyesuaikan dengan kebutuhan di dunia usaha dan industry, perubahan itu membutuhkan pengetahuan, pengalaman lapangan dan keterampilan yang baru. Selain itu taktik, teknik, metode, dan strategi pembelajaran program adaptif dan program produktif tidak sama. Perbandingan 70 : 30 materi pembelajaran sangat dianjurkan Termasuk perbandingan pembelajaran dan teori pembelajaran produktif.

Pemenuhan kebutuhan guru produktif sangat mendesak untuk dipenuhi, Mengingat pentingnya keberadaan yang memiliki peran strategis dalam peningkatan mutu pendidikan dan kemajuan bangsa. PKG dipilih menjadi alternatif solusi jangka pendek. Walaupun kurang efektif untuk perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan

Kekurangan guru dapat dimaklumi karena pemerintah tidak mengangkat guru baru walaupun guru yang pensiun cukup banyak, di DIY saja mencapai 2000 orang, di sekolah dasar didaerah Sleman ada yang guru PNSnya tinggal 4 orang pada hal jumlah klas minimal setiap SD ada 6 sehingga kekurangan tenaga guru, untung banyak tenaga lulusan pendidikan yang masih menganggur mau mengabdikan diri walaupun hanya diberi imbalan yang sangat tidak memadai. Kekurangan guru produktif di DIY jumlahnya mencapai 2000 orang.

Sekitar tahun 1975 pada pemerintahan Presiden Suharto mengangkat guru yang cukup banyak untuk mengatasi kekurangan guru, bersamaan pencanangan SD INPRES sehingga anak usia SD dapat tertampung di SD kemudian SMP dan SMA serta SMK banyak dibuka sehingga memerlukan guru dengan jumlah yang cukup banyak, pemerintah mengangkat guru baru yang cukup banyak dan umumnya usianya waktu itu antara 24 sampai 30 an sehingga sekarang masuk usia pensiun secara bersamaan atau selang hanya beberapa tahun, maka jika sekarang kekurangan guru jika tidak mengangkat yang baru adalah wajar. Kekurangan guru yang selama ini diatasi dengan menerima honorer sebenarnya sangat tidak manusiawi karena honorariumnya sangat kecil tak mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhan minimal anak dan istri. Ada guru honorer yang hanya mendapatkan imbalan dari sekolah kurang dari Rp 500.000 setiap bulannya, dapat dibayangkan dengan 2 anak dan 1 istri serta guru sendiri berarti 5 orang. Manusiawikah seorang hidup dengan RP 100.000 setiap bulan. Pada hal tugas guru Honorer sama beratnya dengan guru PNS. Ini perlu segera diselesaikan agar tidak menimbulkan masalah yang lebih berat lagi.

Untuk mengatasi kekurangan guru tersebut Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY dan stakeholders terkait mencoba mengatasinya lewat guru tenaga kontrak (honorer) sampai diklat keahlian ganda. Di SMK kekurangan guru lebih banyak terjadi pada guru produktif, sedang kekurangan guru adaptif tidak begitu dirasakan. Pada hal keberadaan guru produktif seperti guru Maritim, Pariwisata, Teknologi dan Pertanian sangat diperlukan. Diklat guru keahlian ganda untuk mengatasi kekurangan guru produktif misalnya guru PKN, IPA, Kewirausahaan dilatih menjadi guru Pariwisata, Teknologi, Maritim dan Pertanian.

Walaupun sekarang kekurangan guru masih dapat diatasi dengan tenaga honorer namun persoalannya dalam seleksi guru honorer tidak bisa seketat guru PNS, hal tersebut berakibat pada segi kualitas guru. Oleh karena itu Pemerintah Daerah mengajukan usul agar kekurangan guru segera dapat diatasi dengan mengangkat guru produktif PNS segera dapat dipenuhi. Mengingat setiap tahunnya banyak guru yang pensiun, sehingga jumlah guru PNS semakin

berkurang dan tidak ada pengangkatan guru baru, dengan demikian layanan kepada peserta didik dapat dilakukan secara normal. Pada hal jumlah SMK di DiY ada 246 baik yang berstatus negeri maupun swasta

### **C. Kesimpulan**

Berbagai program diusahakan agar pendidikan di Negara Indonesia tidak ketinggalan dengan negara lain. Masalah setiap negara berbeda, sedang di Indonesia antara lain untuk meningkatkan mutu dan kekurangan guru SMK dengan Program Sertifikasi Keahlian dan Sertifikasi bagi Guru SMk/SMA (Keahlian Ganda) merupakan program prioritas Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) yang bertujuan untuk mengatasi kekurangan guru produktif di SMK, Guru adaptif, normative, dan produktif di SMA dan SMK yang kelebihan guru diberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan kompetensi keahlian baru melalui pendidikan dan pelatihan di PPPPTK/LPPPTK-KPTK terkait sesuai bidangnya.

Kekurangan guru produktif di SMK pasti akan menghambat pencapaian tujuan pendidikan di SMK, sehingga pemerintah memilih mengadakan pendidikan dan latihan bagi guru-guru adaptif dan normatif untuk mengatasi kekurangan tenaga guru dari pada mengangkat guru baru yang memerlukan biaya mahal, walaupun tentu tidak sebaik guru yang memang sesuai bidangnya dan telah melalui pendidikan S1 yang memakan waktu 4 atau 5 tahun.

Program Keahlian Ganda yang dinilai lebih tepat untuk mengatasi kekurangan guru produktif saat ini dilaksanakan 1 tahun melalui kegiatan IN-1 dan IN-2 serta ON-1 dan ON-2, mereka yang dapat melaksanakan semua program dengan baik dalam pendidikan dan latihan (diklat), untuk pemenuhan kebutuhan guru SMK dalam mendukung revitalisasi pendidikan vokasi akan mendapatkan sertifikat Keahlian dan sertifikat Pendidik. Namun perlu dievaluasi dan diteliti efektivitasnya.

## Daftar Pustaka

- Ditjen GTK (2017). ***Petunjuk Teknis Pelaksanaan In Service Training1 dan In Service Training 2***, Jakarta 2017
- Ditjen GTK (2016). ***Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan***. Jakarta
- Kedaulatan Rakyat (2017). ***Kekurangan Guru di DIY Mencapai 2.000 orang***, Yogyakarta , 10/11/2017
- Sugeng Subagya(2017). ***Program Keahlian Ganda***, KR 6/11-2017
- Sekretariat Jenderal MPR RI (2002), ***Persandingan UUD NRI 1945***, Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003(2003),***Tentang Sistem Pendidikan Nasional***,Citra Umbara, Bandung